

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Faktor-Faktor yang terkait dengan peningkatan kualitas KKP

Hasil penelitian terhadap penilaian kuisioner SWOT oleh para responden, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan

Faktor Kekuatan (*Strength*) utama yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah:

1. Petunjuk Pelaksanaan Penatalaksanaan KKP yang diterbitkan oleh BPK RI Pusat pada Tahun 1996;
2. Pelaksanaan E-audit;
3. Reviu yang dilakukan secara rutin oleh Tim Itama terhadap penatalaksanaan KKP

b. Faktor Kelemahan

Faktor Kelemahan (*Weakness*) utama yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah:

1. Reviu KKP oleh Pengendali teknis yang belum dilaksanakan secara mendetail dan menyeluruh;
2. Pemahaman para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang belum memadai atas penatalaksanaan KKP;

3. Sosialisasi tentang penatalaksanaan KKP di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang masih kurang.

c. Faktor Peluang

Faktor Peluang (*Opportunity*) yang utama bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah:

1. Kemajuan teknologi dibidang pemeriksaan yang dapat mempermudah pelaksanaan pemeriksaan dan penatalaksanaan KKP secara elektronik;
2. Tingginya perhatian masyarakat dan lembaga penegak hukum atas hasil pemeriksaan BPK RI;
3. Era reformasi yang menuntut adanya akuntabilitas laporan keuangan negara/daerah dan pelaksanaan pemeriksaan BPK RI;

d. Faktor Ancaman

Faktor Ancaman (*Threat*) yang utama bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah:

1. Otonomi daerah yang diikuti dengan berdirinya kantor-kantor perwakilan BPK RI di provinsi yang baru, sehingga timbul perbedaan pemahaman Auditor atas penatalaksanaan KKP di seluruh kantor perwakilan di Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menuntut keterbukaan informasi hasil pemeriksaan yang didukung dengan keakuratan bukti dalam KKP;

3. Permasalahan kerugian negara/daerah dalam hubungannya dengan hasil pemeriksaan BPK RI sehingga BPK RI sering diminta sebagai pemberi keterangan ahli, dengan demikian keakuratan KKP sangat diperlukan;

5.1.2. Formulasi dan Prioritas Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi *Strength – Opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan sesuai prioritasnya, alternatif strategi yang dipilih berdasarkan kuesioner AHP, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong BPK RI Pusat untuk segera mengesahkan draft Petunjuk Pelaksanaan Penatalaksanaan KKP untuk menyempurnakan Petunjuk Pelaksanaan Penatalaksanaan KKP yang telah diterbitkan tahun 1996;
2. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, aplikasi laporan keuangan oleh penyelenggara keuangan negara/daerah, dan wacana akan dilakukannya e-audit, maka dapat dilaksanakan penatalaksanaan KKP secara elektronik;
3. Karena pengendalian dari Ketua Tim dan Itama telah memberikan banyak pengaruh positif, maka dapat tetap melaksanakan reuiu oleh Itama secara rutin;
4. Karena banyaknya perhatian masyarakat dan lembaga penegak hukum yang membutuhkan data pendukung dari BPK RI, maka untuk meningkatkan kualitas fisik KKP dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas penyimpanan KKP.

5.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saat ini BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah memberikan perhatian yang memadai terhadap kualitas KKP di lingkungan perwakilan, namun harus diakui jika belum ada pemahaman yang sama antar auditor tentang penatalaksanaan KKP yang baik. oleh karena itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung harus mendorong dan memberikan masukan kepada BPK Pusat untuk segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan penatalaksanaan KKP, dalam rangka menuju kualitas KKP yang lebih baik;
2. Menyempurnakan berbagai infrastruktur yang mendukung terlaksananya e-audit, termasuk didalamnya kesiapan auditor untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan penatalaksanaan KKP secara elektronik.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan metode lain, seperti misalnya RIA (*Regulatory Impact Assessment*) untuk meneliti tentang keberhasilan kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.